Jurnal Ilmiah Publika (JIP)
Administrasi Publik – FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati
Vol. 14, No. 1, June 2026, ISSN: 2337-4446; E-ISSN: 2684-8295
Website: https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika

TATA KELOLA LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN SUKAJADI, KOTA PEKANBARU

Dwi Septiyaningsih[1], Sarah Desfri Syarma[2,], Vria Zulmi Rezeki Hasibuan[3], Desta Safitri[4]
[1,2,3,4]Universitas Riau, Indonesia
dwiseptiyaningsih722@gmail.com, sarahdesfrisyarma@gmail.com, viahasibuan123@gmail.com, destasafitri371@gmail.com

Abstract: *Waste management is one of the main challenges in urban areas, especially when formal services are not yet able to fully cover the entire region. In Sukajadi Village, waste management is carried out through the Waste Management Agency (LPS), which functions as a service provider for local residents. Using a qualitative approach through interviews, observations, and document reviews, this study assesses how the LPS is managed based on the principles of Good Environmental Governance (GEG), which include transparency, community participation, accountability, legal certainty, decentralization, and environmental justice. The results show that LPS services receive high support from residents and implement a fee scheme that is adjusted to economic capacity, so that the distribution of service costs is more proportional. However, challenges still arise in terms of information disclosure to residents and limited facilities that affect the consistency of transportation. These findings confirm that LPS governance is moving towards the implementation of GEG principles, but institutional strengthening is still needed to support more sustainable environmental management.*

Keywords: *Waste Management, Community Participation, Sustainable Environment*

Abstrak: Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama di kawasan perkotaan, terutama ketika layanan formal belum mampu mencakup seluruh wilayah. Di Kelurahan Sukajadi, pengelolaan sampah dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), yang berfungsi sebagai penyedia layanan bagi warga setempat. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, studi ini mengevaluasi bagaimana LPS dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola *Good Environmental Governance* (GEG), yang meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kepastian hukum, desentralisasi, dan keadilan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan LPS mendapat dukungan tinggi dari warga dan menerapkan skema tarif yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, sehingga distribusi biaya layanan menjadi lebih proporsional. Namun, tantangan masih muncul dalam hal pengungkapan informasi kepada warga dan fasilitas yang terbatas yang mempengaruhi konsistensi transportasi. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola LPS bergerak menuju implementasi prinsip-prinsip GEG, tetapi penguatan institusional masih diperlukan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: *Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah kini telah menjadi isu global karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat (Tamba, 2024). Hampir seluruh negara menghadapi tantangan serupa, yaitu meningkatnya volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang ada. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu perhatian penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), khususnya pada tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) (Anggiyanti, 2025). Tujuan *SDG's* ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola lingkungan yang efisien, partisipatif, dan adil guna mendukung kehidupan kota yang sehat, bersih, dan memiliki daya saing (Erasmus, 2023).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun, mayoritas berasal dari kawasan perkotaan (Hidup, 2025). Hal ini menunjukkan sebagian besar sampah akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bahkan mencemari lingkungan secara langsung. Kondisi ini membuktikan lemahnya tata kelola pengelolaan sampah, oleh sebab itu penguatan koordinasi kelembagaan dan partisipasi dari masyarakat menjadi langkah strategis untuk bisa menjawab tantangan global sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional tingkat daerah.

Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian di Provinsi Riau juga menghadapi situasi yang serupa. Pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan urbanisasi menyebabkan jumlah volume sampah meningkat (Deni, 2024). Walaupun pemerintah kota telah berupaya memperbaiki sistem pengangkutan dan penanganan sampah, keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak kawasan permukiman maupun perdagangan yang mengalami penumpukan sampah akibat kurangnya pengelolaan dari sumbernya (Irawati, 2025). Hal ini berpotensi menghambat upaya Pekanbaru dalam mendukung pencapaian *SDG's* ke-11 melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kelurahan Sukajadi merupakan salah satu kawasan yang padat akan penduduk di Kota Pekanbaru yang juga dikenal sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru pada tahun 2024, jumlah sampah yang dihasilkan di wilayah perkotaan per hari nya mencapai lebih dari 800 ton, dan sebagian besar berasal dari kawasan padat penduduk seperti Sukajadi (Fahlevi, 2024). Tantangan utama bukan hanya mengenai peningkatan jumlah sampah, tetapi juga sistem pengelolaan yang belum efektif, yaitu masih berorientasi pada pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir

(TPA), tanpa pengelolaan di sumbernya. Kesadaran untuk memilah sampah organik dan anorganik masih rendah, sehingga seluruh sampah bercampur dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Zahra et al., 2025).

Kondisi nyata ini menunjukkan bahwa peran lembaga pengelola sampah di Kelurahan Sukajadi sangat penting, tetapi belum berjalan optimal dalam hal pengawasan, pengelolaan dana iuran, dan pembinaan masyarakat. Lembaga pengelola sampah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Lembaga ini berfungsi mengatur dan mengawasi proses pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah agar berjalan tertib dan efisien. Melalui tata kelola yang baik, lembaga pengelola sampah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan (Darwis, 2024). Di Kota Pekanbaru, peran lembaga pengelola sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Perwako, 2023).

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menghadapi persoalan klasik berupa tingginya volume sampah yang mencapai lebih dari 30 ton dalam sebulan dan keterbatasan sistem pengelolaannya (Hakim, 2025). Realitas ini menunjukkan lemahnya tata kelola di tingkat lokal, terutama pada lembaga pengelola sampah yang belum memiliki sistem kelembagaan dan koordinasi yang memadai. Padahal secara ideal, lembaga tersebut seharusnya berperan sebagai pendorong utama terciptanya pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* secara konsisten (Nurhayati, 2025). Kesenjangan antara kondisi faktual dan ideal inilah yang menjadikan kajian tentang tata kelola lembaga pengelola sampah di Kelurahan Sukajadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dibentuknya LPS di Kota Pekanbaru tentu dengan harapan sampah dikelola sejak dari sumbernya, bukan lagi dibuang ke TPA. Namun jika dilihat dari tingkat pemahaman orang-orang yang diamanahkan dalam struktur LPS ditingkat kelurahan, sepertinya sangat sulit terwujud karena dari pengamatan langsung di lapangan, orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus LPS bukan dari latar belakang pengelola sampah (Widayat, 2025). Melihat kondisi tersebut penelitian ini dinilai penting dilakukan agar dapat mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lembaga pengelola sampah, yang mencakup aspek transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kepastian hukum desentralisasi, dan keadilan lingkungan seperti pada Teori *Good Evironmental Governance* (GEG) (Hermawan, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memahami secara mendalam tata kelola Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kelurahan Sukajadi sebagai satu kasus tunggal yang memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Pendekatan ini dipilih karena studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri proses, aktor, dan berfokus pada satu lokasi dengan fenomena yang ingin dipahami secara holistik (Poltak, 2024). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Wawancara dilakukan kepada pengurus LPS, aparat Kelurahan, ketua RT/RW, serta warga pengguna layanan di Kelurahan Sukajadi. Observasi dilakukan untuk mencatat pelaksanaan operasional seperti pola pengumpulan sampah, rute pengangkutan, serta kondisi sarana prasarana. Dokumen yang dianalisis mencakup SOP LPS, laporan kegiatan, serta Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 (Perwako, 2023) yang menjadi dasar pelaksanaan teknis pengelolaan sampah di kelurahan.

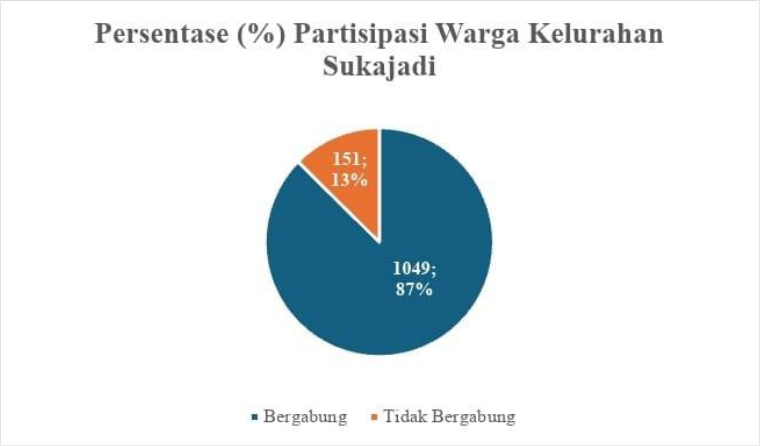
Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni membaca keseluruhan data, mengidentifikasi kategori dari data, dan menghubungkan temuan yang muncul sesuai konteks tata kelola layanan publik. Analisis isi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan pola makna dari narasi dan dokumen secara sistematis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melalui *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti telah sesuai dengan kondisi lapangan (Septiana, 2024). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola LPS Sukajadi dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di tingkat kelurahan seperti Sukajadi berlangsung dalam konteks nasional yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas layanan (Hidayat, 2024). Dalam situasi seperti itu, keberadaan lembaga berbasis masyarakat seperti LPS menjadi krusial karena mampu mengisi celah pelayanan melalui mekanisme sosial yang dibangun secara mandiri oleh warga. Dengan menggunakan Teori *Good Environmental Governance* (GEG) kita dapat melihat bagaimana aturan dijalankan, dan bagaimana akuntabilitas dijaga dalam praktik sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, dan keadilan lingkungan menjadi relevan ketika melihat bagaimana LPS bekerja bukan hanya sebagai pengangkut sampah, tetapi sebagai wadah yang menegosiasikan peran, kewajiban, dan kepentingan warga dalam menjaga kualitas lingkungan (Kurnianingrum, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kelurahan Sukajadi adalah model tata kelola lingkungan yang dibangun oleh masyarakat melalui persetujuan lokal. Pola ini menunjukkan bagaimana organisasi non-formal dapat mengambil alih fungsi layanan publik ketika kapasitas pemerintah daerah terbatas. Pada saat yang sama juga menegaskan kembali pentingnya prinsip tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*) untuk memastikan bahwa layanan publik diberikan secara efisien, adil, dan berkelanjutan.

Mekanisme kesepakatan kolektif antara RT, RW, dan tokoh masyarakat mendorong perkembangan LPS Sukajadi. Karena kebijakan muncul dari kebutuhan ekologis yang dirasakan bersama, proses ini menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat. Pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah menunjukkan keterlibatan yang inklusif dalam formulasi kebijakan, Kondisi ini menciptakan legitimasi internal dalam konteks *governance*.



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Gambar 1. Persentase Partisipasi Warga Kelurahan Sukajadi

Grafik partisipasi warga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam layanan LPS mencapai 87%, dengan 1.049 rumah tangga bergabung dan hanya 151 rumah yang belum bergabung. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga melihat LPS sebagai layanan penting dan bermanfaat, terutama dalam hal mengangkut sampah rumah tangga secara rutin. Selain itu, partisipasi yang luas ini menunjukkan legitimasi sosial LPS dan kapasitasnya untuk membangun kepercayaan. Meskipun demikian, sebagian kecil warga yang tidak terlibat masih dapat menyebabkan masalah apabila membuang sampah ke tempat ilegal atau ke pasar.



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Gambar 2. Variasi Iuran Layanan LPS Sukajadi

Variasi iuran yang diterapkan LPS adalah komponen penting dari pemahaman tentang tata kelola layanan. Iuran bervariasi menurut kemampuan ekonomi dan jenis aktivitas, seperti yang ditunjukkan pada grafik kedua. iuran 10.000 untuk orang berpendapatan rendah, 15.000 untuk orang berpendapatan menengah, 20.000 untuk rumah tangga umum, dan 50.000 untuk ruko. Pola ini menunjukkan modifikasi kebijakan yang mempertimbangkan keadilan sosial dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Selain itu, tarif ruko yang lebih tinggi membantu membiayai layanan tetap berjalan meskipun beberapa warga membayar lebih rendah.

Kualitas layanan LPS Sukajadi umumnya dinilai baik oleh warga, terutama dalam hal konsistensi pengangkutan sampah dua hari sekali. Namun temuan wawancara mengungkap berbagai keterbatasan teknis yang memengaruhi ketepatan jadwal, seperti kerusakan kendaraan, antrean panjang di transfer depo, atau petugas yang berhalangan hadir. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan layanan sangat dipengaruhi ketersediaan armada dan dukungan operasional. Ketika terjadi keterlambatan, sampah menumpuk dan menimbulkan bau, menunjukkan bahwa stabilitas layanan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih kuat.

Dari sisi tata kelola, transparansi internal antara pengurus dan RT/RW cukup baik melalui laporan bulanan yang disusun bendahara. Namun, transparansi kepada warga masih terbatas pada informasi dasar seperti jumlah iuran dan jadwal pengangkutan. Akuntabilitas publik belum lengkap karena warga tidak dapat mengakses laporan keuangan secara langsung. Meskipun tidak ada konflik, pola komunikasi *top-down* harus diperhatikan agar kesetaraan informasi antara lembaga dan warga lebih terjaga.

Selain itu, aspek kepatuhan warga terhadap aturan LPS menarik perhatian. Mekanisme kontrol sosial yang efektif termasuk aturan yang melarang membuang

sampah ke TPS pasar dan sanksi untuk tidak mengambil sampah bagi mereka yang tidak membayar iuran. Sanksi sosial terbukti cukup kuat untuk mendorong orang untuk mematuhi aturan, meskipun tidak berbasis hukum formal. Walau bagaimanapun, beberapa kasus di mana warga tidak membayar dan akhirnya membuang sampah ke tempat lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan LPS Sukajadi bukan hanya menjadi penyedia layanan pengangkutan sampah, tetapi telah berfungsi sebagai arena tata kelola lingkungan yang memperlihatkan bagaimana peran warga, struktur lokal, dan mekanisme organisasi berinteraksi membentuk kinerja pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Dinamika yang tercipta menunjukkan bahwa sebagian prinsip tata kelola lingkungan yang baik telah tercermin dalam praktik, terutama melalui keterlibatan warga yang tinggi dan skema iuran yang mempertimbangkan keadilan distribusi beban. Namun demikian, ketidakseimbangan kapasitas operasional yang terbatas, menyebabkan kualitas layanan belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola yang berjalan memiliki fondasi yang kuat, tetapi belum mencapai kematangan institusional yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas persoalan sampah perkotaan. Dengan demikian, penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi publik, dan pembenahan kapasitas kelembagaan menjadi kunci agar LPS Sukajadi dapat bergerak dari sekadar penyedia layanan menuju aktor tata kelola lingkungan yang lebih kokoh dan berkelanjutan serta mewujudkan LPS dengan mengacu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle)*.

Acknowledgement

Penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pengampu atas dukungan penuh, bimbingan akademik, serta kemudahan izin turun lapangan melakukan penelitian yang telah memungkinkan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan *study* ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada para informan penelitian di Kelurahan Sukajadi atas kemudahannya mendapatkan data primer serta sekunder yang penulis butuhkan.

References

Anggiyanti, D. B., Widya, D., & Simarangkir, E. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. *2*(1).

Darwis, R. S. (2024). PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS STAKEHOLDERS DI DAERAH PARIWISATA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, *7*(1), 13–22. https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.55410

Deni Ramadhansyah, doni guspandri sri aprilia. (2024). ANALISIS DAMPAK SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*, 898–908.

Erasmus Humanika, Agung Trisusilo, R. F. S. (2023). *THE ROLE OF BUMDES (VILLAGE-OWNED ENTERPRISES) IN ACHIEVING VILLAGE SDGs*. *8*(2), 101–116.

Fahlevi, R. (2024). *DLHK Pekanbaru Berupaya Optimalkan Pengelolaan Sampah*. Pekanbaru.Go.Id. https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dlhk-pekanbaru-berupaya-optimalkan-pengelolaan-sampah

Hakim, L. (2025). SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA BANK SAMPAH MUTIARA DENGAN PT. PEGADAIAN KOTA PEKANBARU. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *2*(3), 5172–5181.

Hermawan, C. F. K. I. H. (2012). Good Environmental Governance. In *Universitas Brawijaya Press (UBP)*.

Hidayat, F. (2024). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru di kecamatan sukajadi*.

Hidup, K. L. (2025). *Akhiri Open Dumping Sampah, Bangun Peradaban Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya*. Kemenlh.Go.Id.

Irawati, IsbonPageno, S. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi. *JSIP: JurnalStudiInovasiPemerintahan*, *1*(2), 41–57.

Kurnianingrum, T. P., Dalam, K., & Tangga, R. (2025). *Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *XVII*(1), 1–5.

Nurhayati. (2025). *Desa Keberlanjutan Implementasi SDGs dalam Pembangunan Desa di Indonesia*.

Perwako. (2023). *PERWA NO 28 TAHUN 2023 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*.

Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). *Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif*. 1–4. https://doi.org/10.59810/localengineering

Septiana, N. N. (2024). METODE PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENDEKATAN KUALITATIF Nyangfah. *Didaktik :JurnalIlmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *10*, 233–243.

Tamba, W. P. (2024). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Jakarta di TPST Bantargebang*. *4*(2), 248–262.

Widayat, P. (2025). Peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri*, *5*(3), 108–113.

Zahra, F. A., Febriyanti, N. S., Astuti, S., Septiadi, M. A., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., & Negeri, U. I. (2025). *Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara di (TPS) Pasar Baleendah*. *1*(2), 1–7.